

Aturan 5 Tahun Pengurus Golkar Bisa Diubah Demi Loloskan Gibran jadi Ketum

Category: Politik

written by Redaksi | 13/08/2024



ORINEWS.id – Wacana perubahan syarat masa jabatan pengurus [Partai Golkar](#) selama lima tahun agar dapat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum (Ketum) kembali mencuat. Isu ini mencuat setelah adanya kemungkinan [Gibran Rakabuming Raka](#) akan menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar.

Menurut komunikolog [Politik](#) dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, sejak 5 tahun lalu, dirinya sudah mengatakan bahwa kursi Ketum Golkar dipersiapkan untuk [Joko Widodo](#). Sedangkan Airlangga hanya sebagai penjaga posisi sambil menunggu saat yang tepat [Jokowi](#) mengambil alih.

“Analisis saya simpel, sebab Jokowi butuh posisi politik yang kuat, untuk tetap berada dalam pusaran kekuasaan. Hal ini diperkuat pada 2024 Jokowi boleh dikatakan menjadi musuh bebuyutan [PDIP](#), maka menjadi Ketum Golkar adalah cara untuk menyeimbangkan kekuatan dan permainan,” kata Kang Tamil kepada

RMOL, Selasa (13/8).

Namun usai [Pilpres 2024](#), lanjut Kang Tamil, situasi politik berubah. Di mana, Gibran menjadi Wakil Presiden dan lebih memerlukan posisi Ketum Golkar agar tidak dijadikan “ban serep” dalam kepemimpinan [Prabowo Subianto](#).

“Walaupun kita tahu Pak [Prabowo](#) ini jiwanya ksatria, dan dia sudah berkomitmen untuk membagi porsi tugas kepada Gibran, tampaknya Jokowi tidak sepenuhnya percaya dengan hal tersebut dan menjadi Ketum Golkar bagi Gibran ini salah satu cara memastikan pembagian porsi kewenangan presiden dan wakil presiden itu tetap akan dilakukan Pak Prabowo,” jelas Kang Tamil.

Sementara itu, terkait adanya aturan yang menjadi Ketum Golkar harus pernah menjadi pengurus selama 5 tahun, kata dosen di Universitas Dian Nusantara ini, hal itu dapat diubah. Mengingat, dalam Munas, yang dibahas perubahan dan penyempurnaan AD/ART terlebih dahulu, baru setelah itu pengesahan dilakukan pemilihan Ketum baru.

“Jadi bisa saja syarat itu dihilangkan pada AD/ART yang baru nantinya pada Munas di Desember 2024. Kemudian perihal lain, soal pemilihan ketua umum ini, diatur dalam tata tertib munas, bisa jadi walaupun aturan soal 5 tahun menjadi pengurus itu ada dalam AD/ART, namun jika dalam tatib pemilihan ketua umum klausul itu tidak ada, maka sah saja Gibran maju,” tutur Kang Tamil.

“Jadi artinya, tidak ada hal yang haram bagi Gibran untuk mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar,” tegasnya.

Di sisi lain, jika deklarasi Gibran dilakukan sekarang, maka hal itu menguntungkan Golkar pada Pilkada 2024 ini. Sebab, pemilih Jokowi dan Gibran tentu cenderung akan memilih calon-calon dari Golkar.

“Jadi saya melihat bahwa pengambilalihan Golkar oleh Pak

Jokowi baik secara langsung ataupun menggunakan Gibran, adalah upaya membangun kekuatan politik, untuk tidak dicerca kawan dan lawan dalam perjalanan politik ke depan,” pungkas Kang Tamil